

COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA TASIKMALAYA

Imang Firmansyah*, Rustandi, Basuki Rahmat

Program Pascasarjana STIA YPPT Priatim Tasikmalaya

e-mail co Author: * tsabit_0812@yahoo.com

ABSTRAK

Pengelolaan sampah merupakan salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh kota-kota di seluruh dunia, termasuk Pemerintah Kota Tasikmalaya. Dengan pertumbuhan populasi yang pesat dan urbanisasi yang terus berlanjut, masalah sampah semakin kompleks dan memerlukan pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif untuk mengatasinya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data, display data, verifikasi dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Collaborative Governance dengan pendekatan yang melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan kelompok-kelompok masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan program pengelolaan sampah masih belum berjalan dengan baik dalam mengatasi masalah sampah di Kota Tasikmalaya. Kesimpulan dari penelitian ini dalam konteks pengelolaan sampah, collaborative governance dapat menjadi solusi yang lebih berkelanjutan dan efektif karena melibatkan berbagai kepentingan yang beragam.

Kata kunci : Collaborative Governance dan Pengelolaan Sampah

PENDAHULUAN

Tata kelola atau *Collaborative Governance* dalam pengelolaan sampah merupakan pendekatan multifaset yang menekankan kerja sama dan koordinasi antar pemangku kepentingan untuk mengatasi tantangan kompleks yang terkait dengan pengelolaan sampah, daur ulang, dan kelestarian lingkungan. Pendekatan ini mengakui bahwa pengelolaan sampah bukan semata-mata tanggung jawab otoritas pemerintah atau badan swasta, sebaliknya hal ini memerlukan partisipasi aktif dari masyarakat, dunia usaha, organisasi non-pemerintah dan pihak-pihak berkepentingan lainnya.

Collaborative Governance atau tata kelola kerjasama dalam pengelolaan sampah melibatkan penyatuan berbagai kelompok pemangku kepentingan, termasuk lembaga pemerintah, masyarakat lokal, perusahaan pengelolaan sampah, organisasi lingkungan hidup, dan akademisi, untuk secara kolektif mengambil keputusan dan membentuk kebijakan terkait pengelolaan sampah. Sampah menjadi tanggungjawab bersama, dimana dalam prinsip ini mengakui bahwa pembuatan, pengumpulan, dan pembuangan sampah merupakan tanggung jawab bersama dan seluruh pemangku kepentingan harus berkontribusi untuk menemukan solusi berkelanjutan. Hal ini

termasuk mengurangi timbunan sampah di sumbernya, meningkatkan program daur ulang, dan memastikan pembuangan sampah berbahaya dengan benar.

Definisi *collaborative governance* (Gash & Ansell, 2007, hal. 543) mengemukakan: “*Collaborative governance* sebagai sebuah strategi baru dalam tata kelola pemerintahan yang membuat beragam pemangku kebijakan berkumpul di forum yang sama untuk membuat sebuah konsensus bersama”. *Collaborative governance* diperlukan ketika pengelolaan suatu sektor membutuhkan lebih banyak kekuatan teknis, analitis dan/atau keuangan daripada yang dipegang oleh satu pihak. Dari perspektif administrasi publik, kolaborasi merupakan bekerja sama atau lebih tepatnya berbicara dengan berbagai pihak terkait.

Definisi *collaborative governance* (Subarsono, 2005, hal. 174) menjelaskan bahwa: “*Collaborative governance* merupakan sebuah yang di dalamnya untuk mengusung kepentingan masing-masing instansi dalam mencapai tujuan bersama”. Menurut Strauss (Noor et al., 2022, hal. 21) menyatakan: “*Collaboration* mengacu pada proses melibatkan orang ketika mereka bekerja sama dalam suatu kelompok, organisasi atau komunitas untuk merencanakan, membuat, memecahkan masalah dan membuat keputusan”.

Kolaborasi yang efektif bergantung pada pembagian informasi dan pertukaran data yang transparan. Akses terhadap informasi yang akurat dan terkini mengenai timbunan sampah, tingkat daur ulang, dan dampak lingkungan sangat penting untuk pengambilan keputusan yang tepat. Kerangka tata kelola kolaboratif menyediakan mekanisme untuk menyelesaikan konflik dan perselisihan yang mungkin timbul antara pemangku kepentingan dengan kepentingan dan prioritas pengelolaan sampah yang berbeda. Manfaat tata kelola kolaboratif dalam pengelolaan sampah mendorong pengembangan strategi pengelolaan sampah komprehensif yang mempertimbangkan faktor lingkungan, ekonomi dan sosial, sehingga menghasilkan solusi yang lebih berkelanjutan.

Melalui *Collaborative Governance* dapat memunculkan sebuah inovasi dalam pengurangan sampah dan praktik daur ulang dengan memanfaatkan keahlian kolektif dan kreativitas berbagai pemangku kepentingan. *Collaborative Governance* dapat juga meningkatkan tanggungjawab pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan akan mendorong akuntabilitas dan memastikan bahwa kegiatan pengelolaan sampah sejalan dengan kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat. Masyarakat seringkali paling terkena dampak dari kegiatan pengelolaan sampah. Tata kelola kolaboratif memungkinkan masyarakat berpartisipasi dalam pengembangan kebijakan dan praktik yang berdampak langsung terhadap lingkungan dan kualitas hidupnya.

Tantangan dalam *Collaborative Governance* atau tata kelola kolaboratif dalam pengelolaan sampah diantaranya terdapat kepentingan yang bersaing diantara para pemangku kepentingan, sehingga sulit mencapai konsensus mengenai keputusan pengelolaan sampah. Sumberdaya yang kurang, baik dalam bentuk anggaran maupun sumber daya manusia menghambat terhadap efektivitas penerapan proses tata kelola kolaboratif pengelolaan sampah. Permasalahan pengelolaan sampah bisa

menjadi sangat kompleks, melibatkan tantangan teknis, peraturan, dan logistik yang memerlukan pemahaman mendalam tentang permasalahan tersebut.

Merancang dan memelihara struktur tata kelola yang efektif dapat menjadi tantangan dan memerlukan pertimbangan yang cermat terhadap peran, tanggung jawab, dan proses pengambilan keputusan. *Collaborative Governance* atau dalam pengelolaan sampah menawarkan pendekatan yang menjanjikan untuk mengatasi tantangan produksi dan pembuangan sampah yang semakin meningkat. Dengan melibatkan banyak pemangku kepentingan, berbagi informasi, dan berupaya mencapai tujuan bersama, tata kelola kolaboratif dapat menghasilkan praktik pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan. Pada bagian berikut, makka akan mempelajari lebih dalam aspek spesifik pengelolaan sampah kolaboratif, mengeksplorasi studi kasus, praktik terbaik, dan solusi inovatif di bidang ini.

Masalah utama dalam pengelolaan sampah di Kota Tasikmalaya yang terkait dengan *collaborative governance* mencakup beberapa aspek, diantaranya salah satu masalah utama dalam *collaborative governance* yaitu kesulitan mencapai kesepakatan antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta mengenai visi dan tujuan pengelolaan sampah. Bila semua pihak tidak memiliki pemahaman yang sama tentang apa yang ingin dicapai, hal ini dapat menghambat kemajuan. Dalam pengelolaan sampah yang efektif, partisipasi aktif masyarakat sangat penting. Namun, masalah seperti kurangnya kesadaran masyarakat, kurangnya pemahaman mengenai pentingnya pengelolaan sampah yang baik, atau ketidakmampuan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dapat menjadi hambatan dalam *collaborative governance*.

Stakeholder yang terlibat dalam *collaborative governance* seringkali memiliki kepentingan yang berbeda. Misalnya, pemerintah mungkin memiliki tujuan keuangan dan politik tertentu, sementara masyarakat mungkin lebih fokus pada kesehatan dan lingkungan. Perbedaan ini dapat menyulitkan pencapaian konsensus dan implementasi kebijakan yang efektif. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola kolaboratif dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Pulau Tiga Barat berjalan relatif baik memiliki implikasi yang signifikan dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sampah di daerah tersebut (Idris, dkk. 2022). Hasil penelitian selanjutnya menunjukkan bahwa kolaborasi pengelolaan sampah di Desa Tulung Selapan Timur telah membuahkan keberhasilan dalam penerapan program pengelolaan sampah berkelanjutan. Hal ini tentu merupakan suatu perkembangan positif yang dapat memberikan banyak manfaat bagi masyarakat dan lingkungan .

Kolaborasi yang efektif memerlukan koordinasi yang baik antara berbagai pihak yang terlibat. Jika koordinasi kurang, risiko terjadinya tumpang tindih dalam program-program pengelolaan sampah atau bahkan konflik antara stakeholder dapat meningkat. Pendidikan dan kesadaran yang rendah tentang pentingnya pengelolaan sampah yang benar dapat menyebabkan masyarakat tidak mengikuti

aturan atau praktik-praktik pengelolaan sampah yang baik. Oleh karena itu, upaya edukasi dan kesadaran publik adalah hal yang penting dalam *collaborative governance*.

Untuk mengatasi masalah-masalah ini, perlu adanya upaya serius dalam membangun komunikasi yang efektif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, serta memfasilitasi dialog terbuka untuk mencapai kesepakatan bersama mengenai pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Selain itu, perlu investasi dalam pendidikan dan kesadaran masyarakat, serta alokasi sumber daya yang memadai untuk mendukung program-program pengelolaan sampah yang efektif di Kota Tasikmalaya.

METODE

Penelitian menggunakan metode kualitatif, dengan tujuan memahami dan menganalisis berbagai aspek dari *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah di Kota Tasikmalaya. Adapun langkah yang dilakukan dengan mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam *collaborative governance* terkait pengelolaan sampah di Kota Tasikmalaya, dengan melibatkan pemerintah daerah, lembaga swasta, LSM, masyarakat, dan lain sebagainya.

Metode kualitatif melibatkan wawancara mendalam, observasi, dan analisis dokumen. Wawancara dilakukan dengan berbagai pemangku kepentingan dan mengumpulkan dokumen terkait kebijakan atau peraturan terkait pengelolaan sampah. Analisis data kualitatif melibatkan proses merinci data yang dikumpulkan, mengidentifikasi pola, tema, dan tren yang muncul, yang selanjutnya disajikan dalam bentuk naratif, dan terakhir dibuat suatu kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan dan penanganan masalah sampah di Kota Tasikmalaya merupakan tugas dari Dinas Lingkungan Hidup, namun secara teknis berdasarkan Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 85 Tahun 2016 pengelolaan sampah merupakan tugas dan tanggungjawab UPTD Tempat Pemrosesan Akhir Sampah, dimana UPTD TPA mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas dibidang pengelolaan tempat pemrosesan akhir sampah. Salah satu fungsi yang dimilikinya yaitu melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pengelolaan sampah di Kota Tasikmalaya.

Berbagai keterbatasan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam pengelolaan dan penanganan sampahnya, dapat membuka ruang melalui kerjasama daerah, maupun dengan pihak ketiga. Dasar hukum dalam melakukan kerjasama tersebut diantaranya didasarkan pada Pasal 363 sampai dengan Pasal 369 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 Tentang Kerja Sama Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga.

Collaborative Governance dalam pengelolaan sampah di Kota Tasikmalaya menghadapi berbagai masalah umum yang mempengaruhi keberhasilannya.

Beberapa hambatan diantaranya pihak-pihak yang terlibat dalam kolaborasi, seperti pemerintah daerah, lembaga swasta, LSM, dan masyarakat, kurang memiliki tingkat kekuasaan yang tidak seimbang, dimana dapat membuat salah satu pihak mendominasi proses dan mengabaikan masukan dari pihak lain. Dalam kerangka kolaboratif, seringkali sulit untuk menentukan peran dan tanggung jawab masing-masing pihak, yang dapat menyebabkan konflik dan kebingungan tentang siapa yang harus bertanggung jawab atas tindakan tertentu.

Sumber daya, seperti anggaran dan petugas atau pegawai menjadi kendala dalam pengelolaan sampah. Keberhasilan pengelolaan sampah sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat, dimana hasil penelitian menunjukkan keterlibatan masyarakat secara umum masih rendah dalam proses kolaborasi dalam pengelolaan sampah di Kota Tasikmalaya. Tata kelola dalam pengelolaan sampah, seringkali diakibatkan oleh adanya perubahan kepemimpinan. Perubahan dalam kepemimpinan pemerintah daerah atau organisasi pelaksana yang terlibat dalam kolaborasi dapat mempengaruhi kesinambungan proyek pengelolaan sampah.

Teknologi dan infrastruktur yang diperlukan untuk pengelolaan sampah yang efektif, dimana hal tersebut menjadi salah satu hambatan dalam pengelolaan sampah di Kota Tasikmalaya. Isu lingkungan menjadi hal yang sensitif berkaitan dengan masalah pengelolaan sampah, seperti pencemaran tanah dan air oleh sampah, bisa menjadi hambatan yang serius dalam pengelolaan sampah. Penanganan yang salah dapat mengakibatkan dampak negatif pada lingkungan. Perubahan kebijakan pemerintah atau regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan sampah dapat memengaruhi rencana kolaborasi yang sudah ada.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan tingkat kesadaran masyarakat masih kurang dalam proses pengelolaan sampah, khususnya dalam pengelolaan sampah rumah tangga. Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut penting untuk memiliki komunikasi yang terbuka, membangun kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat, dan merancang kerangka kerja kolaboratif yang jelas dan terstruktur. Dengan demikian, pelaksanaan *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah di daerah dapat menjadi lebih efektif dan berkelanjutan. Peran pihak swasta dan masyarakat menjadi sangat penting dalam upaya pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

Tata kelola kerjasama dalam pengelolaan sampah di daerah memiliki banyak manfaat yang dapat meningkatkan efisiensi, keberlanjutan, dan kualitas layanan pengelolaan sampah. Melalui kerjasama dapat mengarah pada peningkatan kualitas dan konsistensi layanan pengelolaan sampah, seperti pengumpulan, pengangkutan, dan pemrosesan sampah. Melalui kerjasama, ide-ide inovatif dalam pengelolaan sampah dapat ditemukan dan diimplementasikan lebih efektif, seperti daur ulang, pengurangan limbah, dan teknologi ramah lingkungan. Kerjasama dengan sektor swasta dapat membantu menciptakan model bisnis yang berkelanjutan untuk pengelolaan sampah, yang tidak hanya mengandalkan dana publik. Pengelolaan sampah yang baik melalui kerjasama dapat mengurangi risiko terhadap keamanan dan kesehatan masyarakat, seperti penyebaran penyakit dan insiden lingkungan.

Pengelolaan sampah yang efisien dan terintegrasi melalui kerjasama dapat menciptakan lapangan kerja baru dalam sektor ini. Pada intinya melalui kerjasama dapat membantu daerah mematuhi regulasi lingkungan dan kebersihan yang lebih ketat. Dalam rangka mencapai manfaat-manfaat tersebut, penting bagi pemerintah daerah, sektor swasta, dan masyarakat untuk bekerja sama secara sinergis dan memiliki tata kelola yang baik dalam pengelolaan sampah di daerah mereka. Hal ini memerlukan perencanaan, koordinasi, dan komitmen bersama untuk mencapai hasil yang positif dalam pengelolaan sampah

KESIMPULAN

Collaborative governance dapat membantu meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan sampah di Kota Tasikmalaya. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dapat mengoptimalkan sumber daya, termasuk pengumpulan, pemilahan, daur ulang, dan pembuangan akhir sampah, meskipun dalam kenyataannya masih belum berjalan dengan efektif, sehingga masih memerlukan strategi secara teknis tentang pola kerjasama atau *collaborative governance* dalam pengelolaan sampah, terutama dengan pihak swasta

DAFTAR PUSTAKA

- Primus Mukus, Amaliatulwalidain Amaliatulwalidain, M Qur'anul Kariem. (2023). Strategi Collaborative Governance Pemerintah Desa Tulung Selapan Timur dalam Pengelolaan Sampah di Kecamatan Tulung Selapan Tahun 2022. Jurnal Pemerintahan dan Politik.
- Gash, & Ansell. (2007). *Collaborative Governance in Theory and Practice*. Oxford University Press.
- Idris, Dian Herdiana, Iqbal Miftakhul Mujtahid. (2022). Collaborative Governance Dalam Pengelolaan Sampah Di Wilayah Kecamatan Pulau Tiga Barat Kabupaten Natuna. <http://ejournal.mandalanursa.org/index.php/IISIP/index>.
- Noor, M., Suaedi, F., & Mardiyanta, A. (2022). *COLLABORATIVE GOVERNANCE (Suatu Tinjauan Teoritis dan Praktik)*. BILDUNG.
- Subarsono, A. G. (2005). *Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar.